

**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR OLEH SYAHBANDAR PERIKANAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2008 TENTANG PELAYARAN**

TESIS

Oleh

**YULIANA MINAR PUSPITASARI SIREGAR
(2302190015)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR OLEH SYAHBANDAR PERIKANAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2008 TENTANG PELAYARAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

YULIANA MINAR PUSPITASARI SIREGAR

(2302190015)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Minar Puspitasari Siregar

NIM : 2302190015

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

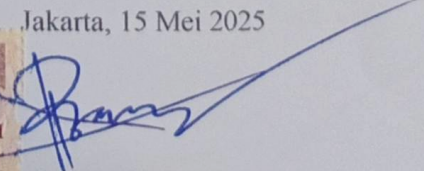
Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR OLEH SYAHBANDAR PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Mei 2025




Yuliana Minar Puspitasari Siregar
NIM: 2302190015



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR OLEH SYAHBANDAR PERIKANAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN”**

Oleh:

Nama : Yuliana Minar Puspitasari Siregar

NIM : 2302190015

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

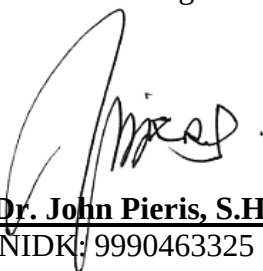
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

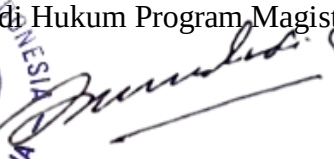

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S.

NIDK: 9990463325


Dr. Wiwik Sri Widiartyi S.H., M.H.

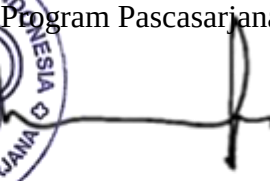
NIDN: 0327096504

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paldada Saragi, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 191691/ 0305097105

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.

NIP/NIDN: 001473/0320116402



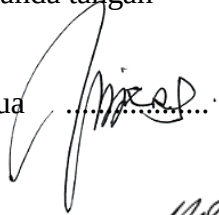
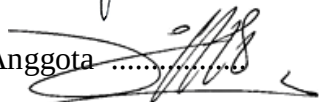
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Mei 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yuliana Minar Puspitasari Siregar
NIM : 2302190015
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR OLEH SYAHBANDAR PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S	Sebagai Ketua	
2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 15 Mei 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuliana Minar Puspitasari Siregar
NIM : 2302190015
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **“ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR OLEH
SYAHBANDAR PERIKANAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 15 Mei 2025

Yuliana Minar Puspitasari Siregar
NIM: 2302190015

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur uji Syukur Kehadirat Tuhan Yesus atas KasihNya pada perjalanan hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar Perikanan Berdasarkan Undang Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”** dengan sukses, yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini akan sulit diselesaikan tanpa campur tangan dan izin Tuhan Yesus, serta dukungan dan nasehat dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar penulis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan sehingga terselesaikannya penelitian tugas akhir yang berbentuk tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.BA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S selaku pembimbing tesis pertama yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis kedua yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen, staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi

pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing- masing serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.

7. Rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi sahabat yang memberikan ide, inspirasi dan motivasi, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Khusus buat yang tercinta, yaitu anak-anakku, karena atas dukungan kuat mereka sehingga semangat dan kekuatan moril semakin tinggi untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia dengan lancar.

Sebagai seorang yang biasa-biasa saja, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidaklah sempurna karena keterbatasan keahlian yang dimiliki. Penulis menyadari segala kekurangan-kekurangan dalam tesis ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai tindakan responsif, penulis menerima segala kritikan kritikan atas kekurangan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih.

Jakarta, 15 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Teori Dan Konsep	18
F. Metode Penelitian	27
G. Orisinalitas Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan	48
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	50
A. Tinjauan Umum Tentang Kapal	50
B. Tinjauan Umum Tentang Ius Constitutum	61
C. Analisa Teori Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar Perikanan	62
D. Analisa Teori Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar Perikanan	67

BAB III BENTUK PENGATURAN TERHADAP SURAT PERSETUJUAN BELAYAR OLEH SYAHBANDAR PERIKANAN SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN	70
A. Bentuk Pengaturan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar Perikanan	70
B. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	73
C. Surat Persetujuan Berlayar	88
D. Perbandingan Hukum Pengaturan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar Malaysia	98
BAB IV AKIBAT HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN DALAM HAL PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN.....	102
A. Sertifikat Kelaiklautan Kapal	102
B. Akibat Hukum	115
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan bertumpu pada pelayaran dan perikanan. Kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas menghadapi risiko tinggi, sehingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menjadi instrumen legal yang menentukan keselamatan, kepatuhan, dan kesinambungan usaha. Perubahan rezim regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 serta turunan Undang-Undang Cipta Kerja melalui PP Nomor 27 Tahun 2021 dan PP Nomor 31 Tahun 2021, memicu pergeseran kewenangan dan kebutuhan harmonisasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan: (1) apakah bentuk pengaturan SPB oleh Syahbandar Perikanan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, dan (2) bagaimana akibat hukum PP Nomor 27 Tahun 2021 serta PP Nomor 31 Tahun 2021 dalam penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

Penelitian menggunakan desain yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkaya wawancara untuk menangkap praktik penerbitan SPB di pelabuhan perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan disharmonisasi normatif dan dualisme administrasi, yang tampak dari perbedaan format dokumen SPB antarkementerian serta isu kompetensi pemeriksaan kelaiklautan yang belum selaras dengan standar marine inspector. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa kepastian hukum SPB tidak cukup ditopang norma tertulis, tetapi memerlukan sinkronisasi kewenangan, standarisasi pemeriksaan, dan integrasi layanan. Kesimpulannya, harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas teknis aparaturnya menjadi prasyarat untuk memperkuat keselamatan pelayaran dan efektivitas tata kelola kapal perikanan..

Kata Kunci: Surat Persetujuan Berlayar; Syahbandar Perikanan; Kelaiklautan Kapal Perikanan; Kewenangan; Harmonisasi Regulasi

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic state, relies heavily on maritime transportation and fisheries. Fishing vessels operating in offshore waters face high risks; therefore, the issuance of a Sailing Approval Letter (Surat Persetujuan Berlayar/SPB) serves as a legal instrument that determines safety, compliance, and business continuity. Regulatory changes, including Law Number 66 of 2024 and the derivative regulations of the Job Creation framework through Government Regulation Number 27 of 2021 and Government Regulation Number 31 of 2021, have triggered shifts in authority and increased the need for inter-agency harmonization. This study aims to address two questions: (1) whether the regulatory framework for SPB issued by Fisheries Harbormasters is consistent with Law Number 66 of 2024; and (2) what the legal consequences of Government Regulation Number 27 of 2021 and Government Regulation Number 31 of 2021 are in relation to the issuance of seaworthiness certificates for fishing vessels.

This study employs a normative juridical design using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, and were complemented by interviews to capture SPB issuance practices at fishing ports.

The findings indicate normative disharmony and administrative dualism, reflected in differences in SPB document formats across ministries and in issues related to seaworthiness inspection competence that has not aligned with marine inspector standards. These findings broaden the understanding that legal certainty for SPB cannot rely solely on written norms, but requires authority synchronization, inspection standardization, and service integration. In conclusion, regulatory harmonization and strengthened technical capacity of implementing officials are prerequisites for improving maritime safety and enhancing the effectiveness of fishing vessel governance.

Keywords: *Sailing Approval Letter (SPB); Fisheries Harbormaster; Fishing Vessel Seaworthiness; Authority; Regulatory Harmonization..*